

STRATEGI KOMUNIKASI DAN KINERJA PENYULUH PERTANIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I Wayan Suadnya^{1)*}, Agus Purbathin Hadi²⁾, Eka Putri Paramita³⁾.
1, 2 Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram
3 Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram
Correspondence: wy.suadnya@gmail.com

ABSTRAK.

Penyuluhan pertanian di Kabupaten Lombok Tengah harus tetap dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun sejak merebaknya Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020 beberapa pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melarang masyarakatnya untuk berkumpul dalam bentuk kegiatan apapun. Disamping itu, masyarakatpun enggan untuk hadir dalam pertemuan karena takut tertular Virus corona. Permasalahannya adalah bagaimana strategi penyuluh pertanian melaksanakan penyuluhan dimasa pandemi dan bagaimana kinerja penyuluhan pada situasi pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi dan kinerja penyuluh pertanian dimasa pandemi Covid-19 di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode survey melalui wawancara telepon seluler terhadap 40 orang penyuluh pertanian. Pemilihan responden dilakukan secara purposive sampling. Data diolah menggunakan deskriptif statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama masa pandemi penyuluhan pertanian masih terus dilaksanakan. Strategi komunikasi yang dilakukan adalah dengan metode komunikasi tatap muka secara individu dan komunikasi bermedia telepon seluler. Pertemuan kelompok ditiadakan dan kunjungan usahatani dan kunjungan rumah menjadi pilihan. Walaupun tidak ada pertemuan secara berkelompok penerapan teknologi anjuran masih dilaksanakan secara tepat oleh petani sehingga hasil analisis kinerja penyuluhan pertanian mengindikasikan kategori sedang, yang artinya walaupun ada kegiatan penyuluhan pertanian yang tidak dilaksanakan tetapi beberapa kegiatan pokok tetap berlangsung dan petani tetap melaksanakan rekomendasi yang diberikan.

Keyword: strategi komunikasi, covid-19, kinerja penyuluh, Lombok Tengah.

1. PENDAHULUAN

Penyuluh pertanian mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan pertanian khususnya dalam transfer teknologi kepada petani. Dengan demikian strategi komunikasi dan kinerja penyuluh menjadi faktor yang utama yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Birhanu (2019) strategi komunikasi penyuluh dapat dikatakan baik jika petani menerima dan menerapkan teknologi yang direkomendasikan. Atau dengan kata lain komunikasi penyuluh dapat dikatakan efektif apabila petani mau mengikuti anjuran dari penyuluh secara tepat dan akurat (Leeuwis, 1999).

Memperhatikan pentingnya peran penyuluh maka kinerja penyuluh juga perlu mendapat perhatian kita semua. Penyuluh dapat dikategorikan berkinerja baik jika telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyuluh sesuai dengan standar indikator yang telah ditetapkan. Standar indikator kinerja penyuluh telah ditetapkan melalui Undang-Undang System Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU SP3K) tahun 2006 (Deptan, 2010).

Penyuluh pertanian dalam mengkomunikasikan inovasi pembangunan pertanian dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanah Undang Undang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat internal

(interinsic) faktor maupun yang bersifat external (exterinsic). Menurut Suhandi, et al (2008) dan Wardani (2004) faktor internal berupa personal faktor dan eksternal berupa situasi dan kondisi lingkungan serta dukungan sarana dan prasarana berpengaruh terhadap kinerja penyuluh.

Sejak bulan Maret 2020 wabah corona (Covid-19) menjadi pandemi di Indonesia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan Pembatasan Nasional Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan juga adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2020). Kabupaten Lombok Tengah sebagai lokasi penelitian tidak luput dari wabah pandemi covid-19. Untuk mengatasi meluasnya penyebaran pandemi pemerintah pusat juga mengeluarkan protokol kesehatan yang harus dipatuhi dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah diseluruh Indonesia termasuk pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Perintah protokol kesehatan tersebut antara lain mengintruksikan untuk masyarakat menjaga jarak (*social distancing*) dengan cara menghindari kerumunan atau berkumpulnya banyak orang disuatu tempat tertentu (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020). Pemerintah daerah kemudian menterjemahkan protokol tersebut sebagai larangan agar masyarakat tidak melakukan pertemuan atau berkumpul dalam jumlah banyak (pada awalnya termasuk solat berjamaah di masjid). Dengan anjuran dan larangan pemerintah tersebut dan dengan adanya ketakutan masyarakat akan tertular oleh virus covid-19 timbul juga penolakan dari masyarakat termasuk masyarakat tani untuk melakukan pertemuan kelompok. Dengan adanya resistensi tersebut menjadi masalah bagi penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya karena komunikasi sebagai sarana essensial bagi penyuluh untuk mentransfer inovasi kepada petani menjadi terganggu atau terhambat. Berdasarkan permasalahan ini timbul pertanyaan, apa dan bagaimana setrategi penyuluh dalam mengkomunikasikan inovasi kepada petani dimasa pandemi covid-19 dan bagaimana kinerja penyuluh dimasa ini di Kabupaten Lombok Tengah? Pada paper ini disajikan hasil penelitian mengenai setrategi komunikasi penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan serta kinerja penyuluh di Kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau kondisi sekarang dengan cara menggambarkan atau mencandra keadaan atau situasi yang dialami oleh subyek penelitian selama masa waktu yang diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Lombok Tengah dengan menggunakan data sejak bulan Maret -September 2020. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 40 orang penyuluh pertanian lapangan yang dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing Balai Penyuluhan Pertanian. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik survey dengan wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan (Quesioner) yang dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler atau Handphone (HP). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyuluh dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan memiliki beberapa alternatif pilihan cara berkomunikasi (metode) yaitu berkomunikasi langsung dan tidak langsung yang bisa dilaksanakan baik secara individu, kelompok maupun masa. Efektifitas cara berkomunikasi tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya tergantung materi yang ingin disampaikan oleh penyuluh itu sendiri (Ray, 2011). Namun metode yang dinilai mempunyai efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian adalah metode komunikasi dalam kelompok (Dubey, 2008). Hal ini disebabkan oleh jumlah orang yang dapat dijangkau dalam satu kali pelaksanaan (acara) penyuluhan cukup banyak dengan jumlah tenaga dan waktu yang dicurahkan sedikit (sekali dalam beberapa jam). Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan penyuluhan di Indonesia lebih mengedepankan pendekatan kelompok (Suadnya, 1998). Pelaksanaan penyuluhan dengan cara berkomunikasi secara individual atau perseorangan memang dinilai sangat efektif, namun membutuhkan banyak waktu dan tenaga serta biaya untuk melaksanakannya. Sehingga cara ini dilaksanakan hanya untuk pelaksanaan penyuluhan tertentu saja.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, penyuluh (semua responden) menyatakan bahwa mereka memilih strategi komunikasi individual (komunikasi perorangan) yang dilaksanakan baik dengan cara bermedia maupun langsung. Menurut para penyuluh, 85 persen komunikasi dalam pelaksanaan penyuluhan pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan dengan menggunakan strategi komunikasi tatap muka secara langsung hanya 15 persen saja dilaksanakan dengan cara komunikasi bermedia. Hal ini dilakukan karena komunikasi langsung tatap muka lebih efektif dan lebih terasa sehingga pesan yang disampaikan lebih cepat difahami dan dimengerti oleh petani. Penyuluh mengklaim bahwa komunikasi secara langsung dengan tatap muka memberikan perasaan dan hubungan yang lebih erat dan lebih nyaman karena kedua belah pihak dapat melihat ekspresi dan ungkapan non bahasa (*non verbal communication*) pada saat percakapan terjadi. Hal ini menyebabkan pula penyampaian pesan menjadi lebih lancar dan timbal balik sehingga menurut penyuluh dikatakan lebih efektif. Penyuluh dan petani lebih leluasa dalam penggunaan waktunya untuk berkomunikasi dan pembicaraan juga bisa diselingi dengan candaan, lelucon dan sebagainya karena mereka merasa lebih bebas dibandingkan dengan komunikasi menggunakan media. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suprpto (2009) bahwa komunikasi individual dengan cara tatap muka langsung lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Menurut penyuluh, kalau menggunakan HP biasanya penyuluh hanya menyampaikan hal-hal pokok saja secara singkat kepada petani dan berusaha untuk membatasi pembicaraan karena takut pulsa HP mereka habis. Disisi lain, petani hampir boleh dikatakan tidak ada yang berinisiatif untuk menelpon penyuluh untuk menanyakan tentang materi penyuluhan. Oleh karena itu penyuluhlah yang berinisiatif menelpon petani untuk menyampaikan materi yang diperlukan oleh petani. Akibatnya penyuluh harus menanggung biaya pulsa. Alasan inilah yang menyebabkan sedikitnya jumlah komunikasi yang dilakukan oleh penyuluh kepada petani dengan menggunakan media HP. Disamping itu, hanya sedikit pula petani yang memiliki HP atau petani yang nomor Hpnya dicatat oleh penyuluh. Menurut penyuluh, hanya petani tertentu saja yang dicatat nomor Hpnya dan dihubungi kalau ada materi yang ingin disampaikan. Penyuluh biasanya minta tolong kepada petani maju untuk membantu menyampaikan informasi yang diberikan kepada petani yang lainnya. Hal

ini sesuai dengan pendapat (Suryana, 2019) yang menyatakan bahwa penyuluh biasanya membangun kontak dan komunikasi dengan petani maju (kontak tani).

Sehubungan dengan pemilihan metode komunikasi perorangan yang dilakukan oleh penyuluh maka pesan yang direncanakan disampaikan kepada petani juga dirancang untuk disampaikan secara tatap muka langsung dan tidak langsung (melalui HP). Pesan yang akan disampaikan melalui proses komunikasi tatap muka langsung disusun dalam bentuk pesan perbal dan tidak menggunakan gambar atau grafis. Pesan sudah terlebih dahulu difahami oleh penyuluh sehingga dengan mudah dapat disampaikan (direproduksi) secara oral oleh penyuluh pada saat berkomunikasi dengan petani. Pesan biasanya dirancang untuk disampaikan di rumah atau di lokasi sawah petani (hamparan) secara oral. Efek yang diharapkan adalah petani mau menerima pesan atau inovasi yang disampaikan. Hasil wawancara dengan penyuluh menyatakan bahwa petani menerima dan menerapkan rekomendasi atau anjuran yang diberikan oleh penyuluh. Untuk memverifikasi pernyataan ini kepada peneliti lainnya disarankan untuk melakukan penelitian terkait efek komunikasi langsung terhadap adopsi inovasi oleh petani.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi pilihan penyuluh pada masa pandemi adalah komunikasi perorangan dengan cara tatap muka langsung dan atau bermedia HP. Hal ini dilakukan karena adanya larangan untuk melakukan pertemuan atau mengumpulkan orang banyak disuatu tempat tertentu oleh pemerintah daerah untuk mencegah penularan virus covid-19. Hal ini kemudian diperkuat lagi dengan adanya perda no 7 tahun 2020 dan pergub no. 50 tahun 2020 untuk mencegah penularan covid-19. Pelanggar perda akan dikenai sanksi.

Strategi komunikasi masa tidak dilakukan oleh penyuluh karena materi yang disampaikan lebih bersifat teknis dan praktek pertanian sehingga sangat sulit untuk diterima oleh petani kalau disampaikan melalui media masa. Disamping itu, petani juga tidak banyak yang memanfaatkan media masa untuk mencari informasi pertanian sehingga oleh penyuluh strategi tersebut dianggap kurang tepat.

Dengan berkurangnya opsi dalam cara berkomunikasi antara penyuluh dengan petani timbul pertanyaan bagaimana kinerja penyuluhan di Kabupaten Lombok Tengah pada masa Pandemi. Untuk mengetahui kinerja penyuluh di Kabupaten Lombok Tengah, ada 11 indikator yang digunakan. Indikator tersebut merupakan penggabungan indikator berdasarkan amanat Undang-undang nomor 16 tahun 2006 tentang SP3K yang terdiri atas (1) tersusunnya program kerja penyuluhan pertanian, (2) tersusunnya rencana kerja tahunan, (3) tersusunnya peta wilayah kerja untuk mengembangkan teknologi spesifik lokasi, (4) terdesiminasikannya informasi teknologi pertanian secara merata, (5) tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, (6) terwujudnya kemitraan petani dengan stakeholder pertanian, (7) terwujudnya akses petani dan pelaku usaha terhadap sumber keuangan informasi dan input produksi dan indikator yang didasarkan atas hasil kajian pustaka seperti (8) akuntabilitas, (9) efektifitas dan (10) efisiensi serta (11) kualitas layanan penyuluh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh Pertanian Lapangan Kabupaten Lombok Tengah masuk dalam kategori sedang dengan modus skor 3. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa indikator yang masih memperoleh skor rendah dan sedang. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kinerja Penyuluh Pertanian sebelum pandemi terjadi. Secara rinci berikut adalah kinerja Penyuluh Pertanian pada masa pandemi.

Tabel 1. Sebaran Penyuluh Pertanian Berdasarkan Skor Kinerja di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Frekuensi					Kategori
		Sangat rendah (1)	Rendah (2)	Sedang (3)	Tinggi (4)	Sangat Tinggi (5)	
1	Tersusunnya program kerja		3	5	32		Tinggi
2	Tersusunnya rencana kerja tahunan				35	5	Tinggi
3	Tersusunnya data peta	5	6	22	7		Sedang
4	Terdesiminasikannya teknologi dan informasi secara merata		10	25	5		Sedang
5	Tumbuhnya keberdayaan dan kemandirian petani		13	20	7		Sedang
6	Terwujudnya kemitraan petani	2	30	5	3		Rendah
7	Terwujudnya akses kepada sumber keuangan, informasi dan input		25	10	5		Rendah
8	Akuntabilitas			19	20	1	Tinggi
9	Efektifitas			22	10	8	Sedang
10	Efisiensi	3	31	6			Rendah
11	Kualitas layanan penyuluh			36	4		Sedang

N:40

Tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Lombok Tengah termasuk kedalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh 5 dari 11 indikator kinerja menunjukkan performen sedang (skor 3), 3 termasuk kategori tinggi (skor 4) dan 3 termasuk kategori rendah (skor 2). Hal ini juga dikonfirmasi oleh pernyataan kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan bahwa pada masa pandemi kinerja penyuluh pertanian biasa-biasa saja yaitu tidak baik dan tidak juga buruk sekali. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penyuluh tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 16 tentang SP3K tahun 2006, namun hasilnya belum maksimal.

Indikator kinerja Penyuluh Pertanian yang mendapatkan skor tinggi adalah indikator (1) tersusunnya program kerja penyuluhan pertanian, (2) tersusunnya rencana kerja tahunan dan indikator (8) akuntabilitas. Tingginya perolehan skor pada ketiga indikator ini disebabkan oleh adanya keniscayaan bahwa penyuluh wajib memiliki program kerja dan rencana kerja tahunan yang biasanya disusun bersama di kantor BPP oleh penyuluh berdasarkan hasil pengamatan dan analisis situasi yang

dilakukan. Petani tidak dilibatkan dalam penyusunan program kerja dan rencana kerja tahunan lebih mengedepankan hasil analisis situasi dan program kerja Dinas Pertanian dimana Penyuluh berada. Selain itu penyuluh diwajibkan untuk menyusun rencana kerja tersebut dan harus mendapatkan persetujuan atau ditanda tangani oleh kepala UPTD dan Koordinator penyuluh, oleh karena itu mau tidak mau penyuluh harus membuat kedua rencana kerja tersebut. Dari hasil wawancara secara insidental dengan beberapa petani mengindikasikan bahwa petani tidak dilibatkan dalam penyusunan kedua rencana kerja tersebut. Menurut Suryana (2019) penyusunan program kerja dan rencana kerja tahunan penyuluhan pertanian, Penyuluh harus melibatkan atau mengikut sertakan petani agar materi penyuluhan yang akan diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhannya. Namun Penyuluh Pertanian dalam menyusun program kerja dan rencana kerja tahunan lebih didasarkan atas rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Pertanian dimana penyuluh bernaung. Hal ini terjadi karena penyuluh harus melaksanakan kebijakan dan program kerja Dinas Pertanian yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian. Menurut penyuluh dimasa yang lalu sering penyuluh membuat program kerja yang didasarkan atas partisipasi dan kebutuhan petani, tetapi program tersebut tidak bisa jalan karena tidak ada dukungan anggaran. Oleh karena itu penyuluh lebih memilih rencana yang bisa diimplementasikan dan jelas penganggarnya. Memperhatikan kenyataan ini maka wajarlah penyuluh tidak banyak melakukan terobosan atau inovasi selain melaksanakan tugas pokok dan tugas rutin dalam melaksanakan fungsi penyuluhan.

Selain kedua indikator di atas yang memperoleh skor tinggi ada satu lagi indikator kinerja yang memperoleh skor tinggi adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Menurut Mardiasmo (2006) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedarmayanti (2003) menyatakan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan menurut Sujarweni (2015), akuntabilitas adalah bentuk keharusan seorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dan tinjauan pustaka tentang akuntabilitas maka dapat dikatakan bahwa wajar kalau penyuluh menilai dirinya sendiri dalam hal akuntabilitas dengan skor tinggi. Hal ini terkait dengan subjektivitas penyuluh dan pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai penyuluh. Penyuluh merasa bahwa mereka sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian walaupun belum bisa memperoleh skor tinggi sebagaimana disajikan pada tabel 1. Penyuluh secara subjektif menilai kinerja mereka dengan memberikan skor sedang. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian tentang kinerja penyuluh pertanian dari sudut pandang petani sehingga diperoleh gambaran kinerja yang lebih objektif.

Sebaliknya untuk tiga indikator kinerja penyuluh yaitu indikator (6) terwujudnya kemitraan petani dengan stakeholder pertanian, (7) terwujudnya akses petani dan pelaku usaha terhadap sumber keuangan informasi dan input produksi dan (10) efisiensi memperoleh skor rendah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Rendahnya skor pada indikator kemitraan terjadi karena menurut penyuluh sampai penelitian ini dilaksanakan petani belum mempunyai hubungan kemitraan yang tetap dengan pelaku usaha pertanian baik supplier input produksi maupun pembeli hasil pertanian yang diproduksi. Hubungan mereka hanya terbatas sebagai pembeli dan penjual dengan tidak ada ikatan apapun. Walaupun ada penyuluh yang memberi skor tinggi (4) itu disebabkan oleh penilaian subjektif penyuluh yang menganggap supplier pupuk sebagai mitra petani. Padahal hubungan antara supplier pupuk dengan petani bukanlah sebagai bentuk kemitraan. Menurut Sulistiyani (2004) kemitraan adalah suatu ikatan kerjasama antara dua atau lebih stakeholder berdasarkan kesepakatan formal bersama yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas untuk mencapai tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Mengacu pada definisi tersebut maka hubungan petani dengan supplier pupuk tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk kemitraan.

Demikian juga halnya dengan indikator (7) terwujudnya akses petani dan pelaku usaha terhadap sumber keuangan informasi dan input produksi memperoleh skor rendah. Kondisi ini disebabkan oleh pernyataan penyuluh yang menyatakan bahwa masih sedikit sekali bahkan boleh dikatakan tidak ada petani yang mengakses modal usahatani dari Bank sebagai lembaga keuangan yang menyediakan pinjaman dengan bunga rendah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Petani masih meminjam modal usahatani dari keluarga atau tetangga dengan bunga yang relatif tinggi. Demikian juga dengan akses informasi baik informasi pasar maupun informasi teknologi, petani masih menggantungkan diri pada Penyuluh pertanian.

Indikator terakhir yang memperoleh skor rendah adalah efisiensi pelaksanaan penyuluhan. Dari hasil wawancara dengan penyuluh diperoleh keterangan bahwa pelaksanaan penyuluhan dengan cara komunikasi langsung tatap muka secara perorangan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama serta tenaga yang banyak. Walaupun ditinjau dari efektifitas penyampaian pesan yang berupa rekomendasi baik teknis maupun lainnya dianggap efektif. Oleh karena itu indikator efisiensi pelaksanaan tugas diberikan skor rendah karena tidak efisien.

Sementara itu lima indikator kinerja penyuluh yaitu indikator (3) tersusunnya peta wilayah kerja untuk mengembangkan teknologi spesifik lokasi, (4) terdesiminasikannya informasi teknologi pertanian secara merata, (5) tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, (10) efisiensi serta (11) kualitas layanan penyuluh termasuk kedalam kategori sedang.

Indikator tersusunnya peta wilayah kerja untuk mengembangkan teknologi spesifik lokasi termasuk kedalam kategori sedang karena masih ada penyuluh yang belum menyusun peta wilayah kerja 11 orang, 22 orang sedang mengerjakannya dan 5 orang sudah membuatnya. Alasan kenapa mereka belum membuatnya adalah karena mereka baru saja dimutasi dari tempat lain sehingga ditempat baru mereka harus membuatnya dari nol kembali. Pemetaan wilayah kerja memang sangat penting dalam perencanaan penyuluhan pertanian. Tanpa pengetahuan yang mendalam tentang wilayah kerja penyuluhan pertanian seorang penyuluh akan mengalami kesulitan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan penyuluhan. Hal ini sesuai dengan pendapat (Rogers (1983) yang menyatakan analisis situasi dan pengetahuan yang mendalam tentang wilayah kerja penyuluhan baik sosial, ekonomi dan biofisik oleh penyuluh sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan penyuluhan di wilayah tersebut.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa terdesiminasikannya informasi teknologi pertanian secara merata diketahui memperoleh skor sedang. Dari beberapa item pertanyaan yang terkait dengan indikator ini diketahui bahwa penyuluh sudah melakukan penyuluhan kepada petani tetapi belum semua petani terjangkau. Masih ada petani yang belum menerima informasi yang dideseminasikan karena terbatasnya tenaga, waktu dan biaya yang dimiliki oleh penyuluh. Apalagi kalau dikaitkan dengan luas wilayah desa yang menjadi tanggung jawab seorang penyuluh. Ditambah lagi dengan adanya larangan mengadakan pertemuan kelompok akibat dari penyebaran wabah covid-19, maka penyuluh harus melakukan kunjungan atau menemui petani satu persatu dirumah atau diusahatani mereka, akibatnya penyuluh tidak mampu mengunjungi semua petani bahkan setengahpun tidak tercapai menurut keterangan mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat Suryana (2019) yang menyatakan bahwa analisis situasi yang meliputi keadaan sosial, ekonomi dan biofisik suatu wilayah diperlukan untuk bisa menyusun dan melaksanakan penyuluhan dengan baik.

Indikator tumbuh dan berkembangnya kemandirian petani memperoleh nilai sedang. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa petani sampai saat ini belum mampu mandiri baik dalam permodalan maupun dalam mencari informasi pertanian. Dari sisi kemandirian permodalan, sampai saat ini petani masih tergantung pada pinjaman dari tetangga atau keluarga. Mereka belum mampu mengakses pinjaman secara mandiri dari Bank. Sedangkan ditinjau dari kemandirian dalam mencari informasi pasar maupun teknologi pertanian, petani masih menggantungkan dirinya kepada penyuluh pertanian.

Hasil penelitian mengenai efisiensi pelaksanaan penyuluhan pertanian pada masa pandemi menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan tidak efisien. Penyampaian pesan dan informasi bisa terlaksana secara efektif tetapi biaya yang dikeluarkan cukup besar baik dilihat dari sudut pandang waktu, tenaga dan uang. Jumlah petani yang dapat dijangkau dengan komunikasi perorangan saat pandemi juga terbatas. Akibatnya tidak semua petani memperoleh informasi dari penyuluh.

Indikator kinerja yang juga memperoleh skor sedang adalah pelayanan penyuluh kepada masyarakat. Penilaian penyuluh terhadap kinerja ini cukup objektif karena penyuluh menyadari bahwa hanya sebagian dari petani yang bisa mereka layani. Sebagian petani tidak bisa terjangkau karena alasan kurangnya tenaga, waktu dan biaya untuk menjangkau petani yang tersebar di wilayah yang cukup luas.

Berdasarkan pembahasan ersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dari 11 indikator kinerja penyuluh yang sudah dinilai secara subyektif oleh penyuluh, lima indikator menunjukkan kinerja sedang, tiga tinggi dan tiga rendah sehingga secara keseluruhan kinerja penyuluh pertanian di kabupaten Lombok Tengah pada masa pandemi Covid-19 adalah sedang.

4. KESIMPULAN

Strategi komunikasi yang dipilih oleh penyuluh dalam mengkomunikasikan pesan berupa materi penyuluhan kepada petani di Kabupaten Lombok Tengah adalah komunikasi perorangan baik secara langsung maupun bermedia telepon seluler atau handphone (HP). Hal ini dilakukan untuk lebih mentaati pelaksanaan standar prosedur pencegahan penularan covid-19. Sedangkan kinerja Penyuluh Pertanian dimasa pandemi covid-19 masuk dalam kategori sedang dengan skor tiga yang artinya bahwa sebagian terbesar (lima indikator) dari sebelas indikator kinerja penyuluhan yaitu tersusunnya peta wilayah kerja untuk mengembangkan teknologi

spesifik lokasi, terdesiminasikannya informasi teknologi pertanian secara merata, tumbuhkembangnya keberdayaan dan kemandirian petani, serta kualitas layanan penyuluh termasuk kedalam kategori sedang. Atau dengan kata lain sudah dilaksanakan tetapi hasilnya belum memuaskan. Sedangkan tiga indikator masuk dalam kategori rendah dan tiga lainnya termasuk dalam kategori tinggi.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi yang telah mengalokasikan anggaran Program Studi untuk membiayai penelitian PNBP ini. Terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah dan para penyuluh yang sudah bersedia diwawancarai dalam penelitian ini. Kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram diucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mempresentasikan paper ini dalam SEMNAS SAINTEK Universitas Mataram tahun 2020.

6. DAFTAR REFERENSI

- 1) Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Pengendalian Stunting di Era Pandemi COVID-19*. <https://kesmas.kemkes.go.id/portal/konten/~rilis-berita/060912-pengendalian-stunting-di-era-pandemi-covid-19>
- 2) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020. Protokol Percepatan Penanganan Corona Virus. <https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol/Protokol%20Percepatan%20Penanganan%20Pandemi%20Corona%20Virus%20Disease%202019.pdfExtension>.
- 3) Ray,G.L. 2011. *Extensison Communication and Management*, Kalyani, India
- 4) Dubey, V.K. 2008. *Extension Education and Management*, New Age International Publisher, Harvad
- 5) Suprpto, T. 2009. *Pengantar Teori dan Manajemen Komunikasi*. MedPress, Jogjakarta.
- 6) Suadnya, I. W. 1998, *The Study of Successful and Less Successful Farmer Groups in The "Supra Insus" Program in West Lombok, Indonesia*. Unpublished Masters Thesis, The University of Queensland, Australia.
- 7) Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, Vol.2, No.1.
- 8) Sedarmayanti. 2003. *Good Govenance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- 9) Sujarweni, W.V. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- 10) Halim, A. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- 11) Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Gava Media, Jogjakarta.
- 12) Rogers, E. M. 1983. *Diffusion of Innovations*. Third Edition. The Free Press. New York
- 13) Sunarya, N.K. 2019. *Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Dalam Teori*. Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Borneo, Tarakan.